RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi..... iii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU..... 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi 15
2.4. Review Terhadap RKPD..... 27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 41
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 41
3.3. Program dan Kegiatan T.A. 2024 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD 44

BAB V PENUTUP..... 47

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah perencanaan teknis operasional tahunan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kinerja serta efektivitas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah terwujudnya dunia usaha yang mantap berbasis potensi daerah didukung oleh Koperasi dan Usaha Mikro yang berorientasi pasar.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas serta dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan terarah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan langkah penyesuaian dengan situasi dan kondisi obyektif yang terjadi.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih, kritik dan saran selalu kami harapkan guna perbaikannya.

Kediri, - - 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

MAMIEK AMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660720 199003 2 008

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Ranwal Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Ranwal Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Rencana Kerja SKPD yang akan tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan 2021 dan 2022, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2024. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menyiapkan program / kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2024, meliputi :

- BAB I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistimatika Penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Restra SKPD
  - 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - 2.4. Review terhadap RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD
  - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3. Program Dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri selama tahun 2021 serta perkiraan target yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2023.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			Sumber Data
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Pengeluaran	1.062.451	963.850	90,72%	BPS

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran RENSTRA 2021-2026 ditampilkan pada tabel berikut ini

Capaian indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran RENSTRA 2021-2026
Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	SUMBER DATA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	SUMBER DATA
Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro	1. Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya	30,00%	38,09%	Database koperasi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	1. Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi	Persentase koperasi aktif	60,35%	61,26%	Data Keragaan Koperasi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)
	1. Persentase peningkatan kualitas usaha mikro	14,55%	16,37%	Database usaha Mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)	2. Meningkatnya jumlah dan volume usaha mikro	Pertumbuhan usaha mikro	5,84%	9,97%	Database usaha Mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. KEDIRI TAHUN 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Hasil) / Kegiatan (Outcome) /sub kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**4,988,909,100**	**99,73%**	**4,904,187,253**	**99,73%**	**98.30%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**5 Laporan**	**4,328,900**	**5 Laporan**	**3,925,900**	**100%**	**174.43%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	1,576,000	2 Laporan	1,173,000	100%	74.43%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	2,752,900	3 Laporan	2,752,900	100%	100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**3,652,798,594**	**12 Bulan**	**3,592,347,297**	**100%**	**98.35%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	3,056,367,250	12 Bulan	3,003,580,093	100%	98.27%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	12 Bulan	431,758,285	12 Bulan	428,732,604	100%	99.30%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	161,776,459	12 Bulan	157,182,000	100%	97.16%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	2,896,600	12 Bulan	2,852,600	100%	98.48%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah**	**12 Bulan**	**6,259,100**	**12 Bulan**	**6,259,100**	**100%**	**100.00%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	6,259,100	12 Bulan	6,259,100	100%	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 Bulan**	**7,500,000**	**12 Bulan**	**7,500,000**	**100%**	**100.00%**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat	2 Orang	7,500,000	1 Orang	7,500,000	**50%**	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**516,331,250**	**12 Bulan**	**503,659,356**	**100%**	**97.55%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	6,858,095	12 Bulan	6,824,225	100%	99.51%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	34 Unit	254,077,220	34 Unit	252,945,350	100%	99.55%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga	12 Bulan	34,871,175	12 Bulan	29,614,190	100%	84.92%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15,664,566	12 Bulan	15,552,918	100%	99.29%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	waktu penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	4,598,000	12 Bulan	4,598,000	100%	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu penyediaan mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	200,262,194	12 Bulan	194,124,673	100%	96.94%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**66 Unit**	**242,850,000**	**66 Unit**	**241,435,400**	**100%**	**99.42%**
Pengadaan Mebel	jumlah mebeler yang diadakan	66 Unit	242,850,000	66 Unit	241,435,400	100%	99.42%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 Bulan**	**104,758,925**	**12 Bulan**	**98,711,100**	**100%**	**94.23%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	1,890,000	12 Bulan	1,890,000	100%	100.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	102,868,925	12 Bulan	96,821,100	100%	94.12%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**47 Unit**	**454,082,331**	**47 Unit**	**450,349,100**	**100%**	**99.18%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin dan perizinannnya	20 Unit	35,240,075	20 Unit	34,476,900	100%	97.83%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	24 Unit	32,216,106	24 Unit	32,150,000	100%	99.79%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 Gedung Kantor	386,626,150	1 Gedung Kantor	383,722,200	100%	99.25%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Tingkat pengawasanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**10.50%**	**433,879,000**	**15,87%**	**399,171,000**	151,14%	**92.00%**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**150 Koperasi**	**433,879,000**	**232 Koperasi**	**399,171,000**	**154.67%**	**92.00%**
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev(pengawasan dan pemeriksaan), yang mengikuti bimtek pemeringkatan dan sosialisasi pra dan hasil pengawasan koperasi	250 Koperasi	168,351,000	232 Koperasi	164,153,000	92.80%	97.51%
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan, revitalisasi koperasi dan peserta studi banding perkoperasian	270 Pengurus Koperasi	265,528,000	323 Pengurus Koperasi	235,018,000	119,63%.	88.51%

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1.67%**	**34,305,000**	**16,29%**	**27,275,000**	**975,45%**	**79.51%**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**120 Koperasi**	**34,305,000**	**135 Kop**	**27,275,000**	**112,5%**	**79.51%**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya dan yang mengikuti bimtek penilaian kesehatan	120 Koperasi	34,305,000	135 Kop	27,275,000	112,5%	79.51%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0.13%**	**695,934,000**	**0.35%**	**669,724,500**	**269,23%**	**96.23%**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian**	**12 kegiatan**	**576,888,000**	**12 kegiatan**	**554,108,500**	**100%**	**96.05%**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	355 Orang	576,888,000	411 Orang	554,108,500	115.77%	96.05%
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah peserta pendidikan dan latihan SDM usaha mikro**	**2 Kegiatan**	**119,046,000**	**4 kegiatan**	**115,616,000**	**200%**	**97.12%**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro	120 Orang	119,046,000	140 Orang	115,616,000	116.67%	97.12%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**19.06%**	**1,792,682,500**	**20.14%**	**1,744,880,417**	**105,68%**	**97.33%**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**12 kegiatan**	**1,792,682,500**	**12 kegiatan**	**1,744,880,417**	**100%**	**97.33%**
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya	514 Orang	1,792,682,500	510 Orang	1,744,880,417	99.22%	97.33%

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**17.75%**	**3,051,772,425**	**25.17%**	**2,761,521,518**	**141.80%**	**90.49%**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**4468 Orang**	**3,051,772,425**	**2425 Orang**	**2,761,521,518**	**54.27%**	**90.49%**
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang di fasilitas kemitraan	100 Orang	24,205,125	40 Orang	9,289,125	40%	38.38%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan dan sosialisasi perizinan	3380Orang	337,424,300	555 Orang	255,540,400	16.42%	75.73%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya dan dikembangkan usahanya	1965 Orang	2,641,885,000	1995 Orang	2,456,238,000	101.53%	92.97%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro	6 Kegiatan	48,258,000	6 Kegiatan	40,453,993	100%	83.83%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**5.66%**	**8,081,473,600**	**8.35%**	**7,851,833,187**	**147.49%**	**97.16%**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**570 Orang**	**8,081,473,600**	**791 Orang**	**7,851,833,187**	**138.77%**	**97.16%**
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan	1440 Orang	8,081,473,600	1371Orang	7,851,833,187	95.21%	97.16%
JUMLAH			**19,078,955,625**		**18,358,592,875**	**99,08%**	**96.22%**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)	
													I		II		III		IV							
2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14=12+6		15 = 14/6x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**9,436,411,804**																				
2	17	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**5,035,496,670**	**81.02%**	**4,121,714,374**	**100%**	**4,988,909,100**	**43.94%**	**737,361,227**	**25.00%**	**1,085,758,252**	**20.45%**	**1,090,584,911**		**1,990,482,863**	**89.39%**	**4,904,187,253.00**	**89.39 %**	**98.30%**	**170%**	**9,025,901,627**	**210 %**	**219%**
2	17	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**7 laporan**	**6,970,800**	**7 Laporan**	**6,429,100**	**5 Laporan**	**4,328,900**	**-**	**-**	**1 Laporan**	**1,583,600**	**3 Laporan**	**1,803,000**	**1 Laporan**	**539,300**	**5 Laporan**	**3,925,900.00**	**100%**	**174.43 %**	**12 Laporan**	**10,355,000**	**171 %**	**161%**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 laporan	2,546,400	3 Laporan	2,004,700	2 Laporan	1,576,000	-	-	-	-	2 Laporan	1,173,000	-	-	2 Laporan	1,173,000.00	100%	74.43%	5 Laporan	3,177,700	167 %	159%
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	4,424,400	4 Laporan	4,424,400	3 Laporan	2,752,900	-	-	1 Laporan	1,583,600	1 Laporan	630,000	1 Laporan	539,300	3 Laporan	2,752,900.00	100%	100.00 %	7 Laporan	7,177,300	150 %	162%
2	17	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**2 laporan**	**4,574,223,870**	**12 Bulan**	**3,108,976,241**	**12 Bulan**	**3,652,798,594**	**3 Bulan**	**664,634,829**	**3 Bulan**	**927,810,724**	**3 Bulan**	**999,612,664**	**3 Bulan**	**1,000,289,080**	**12 Bulan**	**3,592,347,297.00**	**100%**	**98.35%**	**24 Bulan**	**6,701,323,538**	**200 %**	**216%**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3,787,060,600	12 Bulan	2,492,125,845	12 Bulan	3,056,367,250	3 Bulan	509,714,721	3 Bulan	801,097,454	3 Bulan	851,416,708	3 Bulan	841,351,210	12 Bulan	3,003,580,093.00	100%	98.27%	24 Bulan	5,495,705,938	200 %	221%
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	12 bulan	491,097,770	12 Bulan	393,982,896	12 Bulan	431,758,285	3 Bulan	113,142,508	3 Bulan	96,621,270	3 Bulan	98,875,956	3 Bulan	120,092,870	12 Bulan	428,732,604.00	100%	99.30%	24 Bulan	822,715,500	200 %	209%
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	293,168,000	12 Bulan	219,970,000	12 Bulan	161,776,459	3 Bulan	38,925,000	3 Bulan	30,092,000	3 Bulan	49,320,000	3 Bulan	38,845,000	12 Bulan	157,182,000.00	100%	97.16%	24 Bulan	377,152,000	200 %	171%

2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	2,897,500	12 Bulan	2,897,500	12 Bulan	2,896,600	3 Bulan	2,852,600	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	2,852,600.00	100%	98.48%	24 Bulan	5,750,100	200 %	198%
2	17	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah**	**2 laporan**	**13,459,200**	**12 Bulan**	**6,259,200**	**12 Bulan**	**6,259,100**	**3 Bulan**	**1,759,100**	**3 Bulan**	**1,000,000**	**3 Bulan**	**2,000,000**	**3 Bulan**	**1,500,000**	**12 Bulan**	**6,259,100.00**	**100%**	**100.00 %**	**24 Bulan**	**12,518,300**	**200 %**	**200%**
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	13.459.200	12 Bulan	6,259,200	12 Bulan	6,259,100	3 Bulan	1,759,100	3 Bulan	1,000,000	3 Bulan	2,000,000	3 Bulan	1,500,000	12 Bulan	6,259,100.00	100%	100.00 %	24 Bulan	12,518,300	200 %	200%
2	17	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**9,476,000**	**12 Bulan**	**534,753,000**	**12 Bulan**	**7,500,000**	**3 Bulan**	**-**	**3 Bulan**	**-**	**3 Bulan**	**7,500,000**	**3 Bulan**	-	**12 Bulan**	**7,500,000.00**	**100%**	**100.00 %**	**24 Bulan**	**542,253,000**	**200 %**	**101%**
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat	2 orang	9,476,000	-	-	2 Orang	7,500,000	-	-	-	-	1 Orang	7,500,000	-	-	1 Orang	7,500,000.00	**50%**	100.00 %	1 Orang	7,500,000	0%	0%
2	17	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	-	-	1500 Orang	534,753,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%	1500 Orang	534,753,000	100 %	100%
2	17	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**250,398,380**	**12 Bulan**	**166,452,424**	**12 Bulan**	**516,331,250**	**3 Bulan**	**33,291,665**	**3 Bulan**	**89,866,178**	**3 Bulan**	**32,680,251**	**3 Bulan**	**347,821,262**	**12 Bulan**	**503,659,356.00**	**100%**	**97.55%**	**24 Bulan**	**670,111,780**	**200 %**	**403%**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28 jenis	11,299,740	12 Bulan	10,299,740	12 Bulan	6,858,095	3 Bulan	6,539,225	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	285,000	12 Bulan	6,824,225.00	100%	99.51%	24 Bulan	17,123,965	200 %	166%
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	4 unit	83,238,600	11 Unit	64,665,000	34 Unit	254,077,220	2 Unit	7,392,000	7 Unit	60,700,350	4 Unit	19,600,000	21 Unit	165,253,000	34 Unit	252,945,350.00	100%	99.55%	45 Unit	317,610,350	409 %	491%
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga	25 buah	13,594,455	12 Bulan	24,578,787	12 Bulan	34,871,175	3 Bulan	10,529,190	3 Bulan	-	3 Bulan	-	3 Bulan	19,085,000	12 Bulan	29,614,190.00	100%	84.92%	24 Bulan	54,192,977	200 %	220%
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	33,337,585	12 Bulan	33,337,440	12 Bulan	15,664,566	3 Bulan	110,250	3 Bulan	9,065,568	3 Bulan	3,030,750	3 Bulan	3,346,350	12 Bulan	15,552,918.00	100%	99.29%	24 Bulan	48,890,358	200 %	147%
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	waktu penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan	4 buah	4,600,000	12 Bulan	5,298,000	12 Bulan	4,598,000	3 Bulan	2,033,000	3 Bulan	570,000	3 Bulan	1,140,000	3 Bulan	855,000	12 Bulan	4,598,000.00	100%	100.00 %	24 Bulan	9,896,000	200 %	187%
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu penyediaan mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	45 kali	84,328,000	12 Bulan	28,273,457	12 Bulan	200,262,194	3 Bulan	6,688,000	3 Bulan	19,530,260	3 Bulan	8,909,501	3 Bulan	158,996,912	12 Bulan	194,124,673.00	100%	96.94%	24 Bulan	222,398,130	200 %	787%

2	1 7	0 1	2.0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	waktu penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1038 dokumen	20,000,000	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%	12 Bulan	-	100 %	0%
2	1 7	0 1	2.0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**10 unit**	**12,000,000**	**22 Unit**	**125,561,500**	**66 Unit**	**242,850,000**	**40 Unit**	**11,950,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 Unit**	**229,485,400**	**66 Unit**	**241,435,400.00**	**100%**	**99.42%**	**88 Unit**	**366,996,900**	**400 %**	**292%**
2	1 7	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	jumlah mebeler yang diadakan	10 unit	12,000,000	22 Unit	125,561,500	66 Unit	242,850,000	40 Unit	11,950,000	-	-	-	-	26 Unit	229,485,400	66 Unit	241,435,400.00	100%	99.42%	88 Unit	366,996,900	400 %	292%
2	1 7	0 1	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**82,498,600**	**12 Bulan**	**60,585,989**	**12 Bulan**	**104,758,925**	**3 Bulan**	**17,955,633**	**3 Bulan**	**12,929,150**	**3 Bulan**	**34,660,696**	**3 Bulan**	**33,165,621**	**12 Bulan**	**98,711,100.00**	**100%**	**94.23%**	**24 Bulan**	**159,297,089**	**200 %**	**263%**
2	1 7	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4,900,000	12 Bulan	9,150,000	12 Bulan	1,890,000	3 Bulan	990,000	3 Bulan	900,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	12 Bulan	1,890,000.00	100%	100.00 %	24 Bulan	11,040,000	200 %	121%
2	1 7	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	77,598,600	12 Bulan	51,435,989	12 Bulan	102,868,925	3 Bulan	16,965,633	3 Bulan	12,029,150	3 Bulan	34,660,696	3 Bulan	33,165,621	12 Bulan	96,821,100.00	100%	94.12%	24 Bulan	148,257,089	200 %	288%
2	1 7	0 1	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**20 unit**	**86,469,820**	**21 Unit**	**112,696,920**	**47 Unit**	**454,082,331**	**3 Unit**	**7,770,000**	**16 Unit**	**52,568,600**	**10 Unit**	**12,328,300**	**17 Unit**	**377,682,200**	**47 Unit**	**450,349,100.00**	**100%**	**99.18%**	**68 Unit**	**563,046,020**	**324 %**	**500%**
2	1 7	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin dan perizinannnya	10 kendaraan dinas	29,750,000	10 Kendaraan Dinas	25,976,600	20 Unit	35,240,075	1 Unit	170,000	5 Unit	7,313,600	8 Unit	9,313,300	6 Unit	17,680,000	20 Unit	34,476,900.00	100%	97.83%	30 Unit	60,453,500	300 %	233%
2	1 7	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	9 unit	19,800,000	10 Unit	22,000,000	24 Unit	32,216,106	2 Unit	7,600,000	11 Unit	9,385,000	2 Unit	3,015,000	9 Unit	12,150,000	24 Unit	32,150,000.00	100%	99.79%	34 Unit	54,150,000	340 %	246%
2	1 7	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 gedung kantor	36,919,820	1 Gedung Kantor	64,720,320	3 Gedung Kantor	386,626,150	-	-	1 Gedung Kantor	35,870,000	-	-	2 Gedung Kantor	347,852,200	3 Gedung Kantor	383,722,200.00	100%	99.25%	4 Gedung Kantor	448,442,520	400 %	693%
2	1 7	0 3			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Tingkat pengawasanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**10.50%**	**569,424,000**	**89.29%**	**300,326,200**	**10.50%**	**433,879,000**	**0.33%**	**6,811,000**	**6.67%**	**225,673,500**	**1.09%**	**26,402,000**	**2.41%**	**140,284,500**	**10.50%**	**399,171,000.00**	**100%**	**92.00%**	**99.79%**	**699,497,200**	**112 %**	**233%**
2	1 7	0 3	2.0 1		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**150 kop**	**569,424,000**	**296 Koperasi**	**300,326,200**	**318 Koperasi**	**433,879,000**	**10 Koperasi**	**6,811,000**	**202 Koperasi**	**225,673,500**	**33 Koperasi**	**26,402,000**	**73 Koperasi**	**140,284,500**	**318 Koperasi**	**399,171,000.00**	**100.0 %**	**92.00%**	**614 Koperasi**	**699,497,200**	**207 %**	**233%**

2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev(pengawasan dan pemeriksaan), yang mengikuti bimtek pemeringkatan dan sosialisasi pra dan hasil pengawasan koperasi	150 kop dan 100 orang	200,000,000	121 Koperasi	164,346,800	88 Koperasi	168,351,000	8 Koperasi	4,971,000	44 Koperasi	54,276,000	13 Koperasi	8,282,000	23 Koperasi	96,624,000	88 Koperasi	164,153,000.00	100.0%	97.51%	209 Koperasi	328,499,800	173%	200%
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan, revitalisasi koperasi dan peserta studi banding perkoperasian	40 orang	369,424,000	175 Orang	135,979,400	230 Pengurus Koperasi	265,528,000	2 Pengurus Koperasi	1,840,000	158 Pengurus Koperasi	171,397,500	20 Pengurus Koperasi	18,120,000	50 Pengurus Koperasi	43,660,500	230 Pengurus Koperasi	235,018,000.00	100%	88.51%	405 Orang	370,997,400	231%	273%
2	17	04			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1.67%**	**130,000,000**	**93.94%**	**28,746,700**	**1.67%**	**34,305,000**	**0%**	-	**0.42%**	**9,735,000**	**1.04%**	**5,400,000**	**0.21%**	**12,140,000**	**1.67%**	**27,275,000.00**	**100%**	**79.51%**	**95.61%**	**56,021,700**	**102%**	**195%**
2	17	04	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**120 kop**	**130,000,000**	**125 Koperasi**	**28,746,700**	**120 Koperasi**	**34,305,000**	**-**	**-**	**30 Kop**	**9,735,000**	**75 Kop**	**5,400,000**	**15 Kop**	**12,140,000**	**120 Kop**	**27,275,000.00**	**100%**	**79.51%**	**245 Koperasi**	**28,746,700**	**196%**	**100%**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya dan yang mengikuti bimtek penilaian kesehatan	120 koperasi dan 80 orang	130,000,000	125 Koperasi	28,746,700	120 Koperasi	34,305,000	-	-	30 Kop	9,735,000	75 Kop	5,400,000	15 Kop	12,140,000	120 Kop	27,275,000.00	100%	79.51%	245 Koperasi	56,021,700	196%	195%
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan koperasi	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%	0%	-	0%	0%
2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0.13%**	**720,000,000**	**91.66%**	**530,221,200**	**0.13%**	**695,934,000**	**0%**	-	**0.03%**	**199,161,000**	**0.04%**	**169,197,500**	**0.06%**	**301,366,000**	**0.13%**	**669,724,500.00**	**100%**	**96.23%**	**91.79%**	**1,199,945,700**	**100%**	**226%**
2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian**	**4 kegiatan**	**720,000,000**	**415 Orang**	**530,221,200**	**411 Orang**	**576,888,000**	**-**	**-**	**106 Orang**	**84,445,000**	**120 Orang**	**168,297,500**	**185 Orang**	**301,366,000**	**411 Orang**	**554,108,500.00**	**100%**	**96.05%**	**826 Orang**	**1,084,329,700**	**199%**	**205%**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	200 orang	482,250,000	415 Orang	530,221,200	411 Orang	576,888,000	-	-	106 Orang	84,445,000	120 Orang	168,297,500	185 Orang	301,366,000	411 Orang	554,108,500.00	100%	96.05%	826 Orang	1,084,329,700	199%	205%

2	17	05	2.03		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah peserta pendidikan dan latihan SDM usaha mikro**	**90 orang**	**237,750,000**	**2 Kegiatan**	**67,697,560**	**2 Kegiatan**	**119,046,000**	-	-	**2 Kegiatan**	**114,716,000**	**2 Kegiatan**	**900,000**	-	-	**4 kegiatan**	**115,616,000.00**	**200%**	**97.12%**	**6 Kegiatan**	**183,313,560**	**300%**	**271%**
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro	90 orang	237,750,000	2 Kegiatan	67,697,560	120 Orang	119,046,000	-	-	60 Orang	114,716,000	60 Orang	900,000	-	-	120 Orang	115,616,000.00	100%	97.12%	6 Kegiatan	183,313,560	300%	271%
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**32.66%**	**120,000,000**	**92.15%**	**35,831,900**	**19.06%**	**1,792,682,500**	**0%**	-	**0%**	-	**14.30%**	**613,267,917**	**4.77%**	**1,131,612,500**	**19.06%**	**1,744,880,417.00**	**100%**	**97.33%**	**111.21%**	**1,780,712,317**	**121%**	**4970%**
2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**12 kegiatan**	**120,000,000**	**100 Orang**	**35,831,900**	**240 Orang**	**1,792,682,500**	**-**	-	**-**	-	**180 Orang**	**613,267,917**	**60 Orang**	**1,131,612,500**	**240 Orang**	**1,744,880,417.00**	**100%**	**97.33%**	**340 Orang**	**1,780,712,317**	**340%**	**4970%**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya	514 orang	120,000,000	100 Orang	35,831,900	240 Orang	1,792,682,500	-	-	-	-	180 Orang	613,267,917	60 Orang	1,131,612,500	240 Orang	1,744,880,417.00	100%	97.33%	340 Orang	1,780,712,317	340%	4970%
2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**17.75%**	**1,626,491,134**	**94.46%**	**5,485,127,340**	**17.75%**	**3,051,772,425**	**1.78%**	**76,753,125**	**2.67%**	**237,578,000**	**4.15%**	**772,651,900**	**48.40%**	**1,674,538,493**	**57.00%**	**2,761,521,518.00**	**321%**	**90.49%**	**151.46%**	**8,246,648,858**	160%	150%
2	17	07	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**1192 orang**	**1,626,491,134**	**681 Orang**	**5,485,127,340**	**2506 Orang**	**3,051,772,425**	**251 Orang**	**76,753,125**	**377 Orang**	**237,578,000**	**586 Orang**	**772,651,900**	**1213 Orang**	**1,674,538,493**	**2427 Orang**	**2,761,521,518.00**	**97%**	**90.49%**	**3108 Orang**	**8,246,648,858**	**456%**	**150%**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang terdata	3000 usaha mikro	180,000,000	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%	-	-	0%	0%
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang di fasilitas kemitraan	75 orang	35,000,000	0.00%	-	120 Orang	24,205,125	40 Orang	9,289,125	-	-	-	-	-	-	40 Orang	9,289,125.00	33%	38.38%	40 Orang	9,289,125	0%	0%
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan dan sosialisasi perizinan	480 orang	387,957,800	440 Orang	227,743,440	415 Orang	337,424,300	60 Orang	24,444,000	30 Orang	13,623,000	115 Orang	77,340,900	210 Orang	140,132,500	415 Orang	255,540,400.00	100%	75.73%	855 Orang	483,283,840	194%	212%

2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya dan dikembangkan usahanya	712 orang	983,533,334	241 Orang	5,257,383,900	1965 Orang	2,641,885,000	150 Orang	41,100,000	345 Orang	220,755,000	470 Orang	690,949,000	1000 Orang	1,503,434,000	1965 Orang	2,456,238,000.00	100%	92.97%	2206 Orang	7,713,621,900	915 %	147%
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro	3 kegiatan	40,000,000	0.00%	-	6 Kegiatan	48,258,000	1 Kegiatan	1,920,000	2 Kegiatan	3,200,000	1 Kegiatan	4,362,000	3 Kegiatan	30,971,993	6 Kegiatan	40,453,993.00	100%	83.83%	6 Kegiatan	40,453,993	0%	0%
2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**5.66%**	**1,235,000,000**	**68.76%**	**351,386,350**	**5.66%**	**8,081,473,600**	**0.42%**	**138,825,050**	**1.25%**	**224,362,000**	**1.04%**	**793,178,875**	**2.95%**	**6,695,467,262**	**5.66%**	**7,851,833,187.00**	**100%**	**97.16%**	**74.42%**	**8,203,219,537**	**108 %**	**2335 %**
2	17	08	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**380 orang**	**1,235,000,000**	**244 Orang**	**351,386,350**	**816 Orang**	**8,081,473,600**	**60 Orang**	**138,825,050**	**180 Orang**	**224,362,000**	**150 Peserta**	**793,178,875**	**426 Peserta**	**6,695,467,262**	**816 Orang**	**7,851,833,187.00**	**100%**	**97.16%**	**1060 Orang**	**8,203,219,537**	**434 %**	**2335 %**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan	380 orang	1,235,000,000	244 Orang	351,386,350	816 Orang	8,081,473,600	60 Orang	138,825,050	180 Orang	224,362,000	150 Peserta	793,178,875	426 Peserta	6,695,467,262	816 Orang	7,851,833,187.00	100%	97.16%	1060 Orang	8,203,219,537	434 %	2335 %
					JUMLAH		**168%**	**14,078,353,629**	**611.28%**	**10,921,051,624**	**155%**	**19,078,955,625**	**46.46%**	**959,750,402**	**36.04%**	**1,982,267,752**	**42.11%**	**3,470,683,103**	**58.80%**	**11,945,891,618**	**183%**	**18,358,592,875.00**	**911%**	**96.22%**	**795%**	**29,279,644,499**	**130 %**	**268%**

- **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

  a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

     Pada sub kegiatan ini di targetkan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas usaha adalah sejumlah 3.380 orang terealisasi 555 orang atau sebesar 16,42% di karenakan adanya one prestasi dari pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha).

  b. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

     Pada sub kegiatan ini di targetkan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan adalah 100 orang dan terealisasi 40 orang atau sebesar 40% di karenakan untuk mengefisiensikan anggaran maka pelaksanaan kegiatan kemitraan di laksanakan bersama dengan kegiatan sosialisasi bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi serta pelatihan pemasaran untuk usaha mikro.

- **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

  a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

     Pada sub kegiatan ini di targetkan jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev (pengawasan dan pemeriksaan), yang mengikuti bimtek pemeringkatan dan sosialisasi pra dan hasil pengawasan koperasi di targetkan 250 koperasi terealisasi 232 koperasi atau sebesar 92,80%. Semua aksi kegiatan pada kegiatan ini dapat di laksanakan di dukung dengan adanya pendampingan penerapan pelaporan koperasi secara online melalui aplikasi sappakop.

  b. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

     Pada sub kegiatan ini di targetkan jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya 514 orang dan terealisasi 510 orang atau sebesar 99,22%. Pada sub kegiatan ini semua kegiatan dapat terlaksana, terdapat rencana pemberian hibah terhadap 1 koperasi yang tidak dapat terlaksana karena koperasi belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

  c. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

     Pada sub kegiatan ini di targetkan jumlah kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro adalah 6 kegiatan dan terelisasi 6 kegiatan atau sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini semua kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dapat terlaksana.

d. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

   Pada sub kegiatan ini di targetkan jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan 1440 orang terealisasi 1371 orang atau sebesar 95,21%. Pada sub kegiatan ini fasilitasi pemasaran usaha mikro baik melalui pelatihan pemasaran, pameran dalam daerah, pameran luar daerah, shopping festival dan katalog produk usaha mikro Kabupaten Kediri.

- **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

a. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Pada sub kegiatan ini di targetkan jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan, revitalisasi koperasi dan peserta studi banding perkoperasian dengan target 270 Pengurus Koperasi terealisasi 323 Pengurus Koperasi atau sebesar 119,63%. Dengan adanya pemanfaatan aplikasi sappakop sosialisasi peraturan perundangan tidak hanya dapat di lakukan secara tatap muka tetapi juga secara online dan peraturan perundangan yang baru juga secara cepat di informasikan melalui aplikasi sappakop tersebut.

b. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

   Pada sub kegiatan ini di targetkan jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dengan target 120 orang terealisasi 140 orang atau sebesar 116,67%. Kegiatan penilaian kesehatan di dukung dengan pemanfaatan aplikasi sappakop serta antusiasme dari pengurus koperasi untuk di nilai kesehatan koperasinya untuk meningkatkan kinerja koperasi dan mengevaluasi kinerja koperasi selama tahun buku.

c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

   Pada sub kegiatan ini di targetkan jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya dan dikembangkan usahanya 1.965 orang terealisasi 1.995 orang atau sebesar 101,53%. Pada sub kegiatan ini semua kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi dapat di laksanakan dengan baik di dukung dengan adanya supporting kegiatan dari CSR (Corporate Social Responsibility) melalui bantuan alat

untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produk serta proses produksi usaha mikro di Kabupaten Kediri.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dengan semakin berkembangnya usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Kediri, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus berusaha mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Perkembangan Usaha Mikro juga mengalami peningkatan hal tersebut tak lepas dari peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri untuk selalu mendukung tumbuh kembangnya Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kediri. Pada tahun anggaran 2022 sebagai upaya untuk membina dan memberdayakan usaha mikro di Kabupaten Kediri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas produksi usaha mikro, pelatihan kemasan, pelatihan manajemen usaha, pelatihan pemasaran dengan memanfaatkan digitalisasi marketing pembinaan, pelatihan ketrampilan, promosi melalui media cetak (Koran) dalam kegiatan shopping festival, dan fasilitasi perizinan untuk usaha mikro. Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing sehingga dapat meningkatkan ekonomi usaha mikro.

Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kabupaten Kediri

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya	-	Ada	25,00%	30,00%	34,62%	37,14%	31,25%	38,09%	32,40	32,95	
2	Persentase peningkatan kualitas usaha mikro	-	Ada	5,19%	14,55%	14,96%	15,45%	5,34%	16,37%	16,88%	16,98%	
3	Persentase koperasi aktif	-	Ada	58,02%	60,35%	61,58%	62,95%	55,76%	61,26%	61,32%	61,86%	
4	Pertumbuhan usaha mikro	-	Ada	4,52%	5,84%	5,93%	6,18%	7,62%	9,97%	9,88%	9,95%	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Secara Umum permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya aktifitas usaha koperasi dan usaha mikro akibat pandemic covid-19 dan adanya inflasi pada tahun 2022 sehingga berdampak pada omset usaha mikro dan koperasi;
2. Kurangnya pemahaman legalitas usaha sebagai upaya untuk memberikan identitas dan perlindungan terhadap produk usaha mikro;
3. Perlunya peningkatan kualitas/standar produk usaha mikro agar berdaya saing dan berdaya jual;
4. Kurangnya diversifikasi terhadap usaha koperasi;
5. Kurangnya SDM koperasi yang terlatih dalam penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas dan kinerja koperasi;
6. Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing produk usaha mikro yang adaptif terhadap perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa dalam maupun luar daerah utamanya untuk menyiapkan dengan adanya bandara di kabupaten Kediri;
7. Mendesaknya penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian;
8. Perlunya penguatan usaha mikro dan implementasi teknologi informasi dalam pengembangan usaha mikro.

Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri meliputi:

- **Tantangan**

1. Menurunnya aktifitas usaha mikro akibat dampak inflasi sehingga berdampak pada pendapatan;
2. Kurangnya pemahaman legalitas usaha sebagai upaya untuk memberikan identitas dan perlindungan terhadap produk usaha mikro;
3. Perlunya peningkatan kualitas/standar produk usaha mikro agar berdaya saing dan berdaya jual;
4. Kurangnya diversifikasi terhadap usaha koperasi;

5. Kurangnya SDM koperasi yang terlatih dalam penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas dan kinerja koperasi.

- **Peluang**

1. Pemberian stimulus modal usaha untuk usaha mikro sebagai upaya untuk menangani dampak inflasi terhadap usaha mikro;
2. Pemberian pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi perizinan untuk pelaku usaha mikro;
3. Pelaksaan kurasi produk untuk usaha mikro untuk mengindentifikasi kebutuhan utama agar produk usaha mikro dapat terstandarisasi;
4. Pemberian bmbingan teknis tentang diversifikasi usaha koperasi sekaligus pendampingan pengembangan diverisifikasi usaha koperasi agar kegiatan usaha koperasi tidak hanya berupa usaha simpan pinjam sebagai usaha tunggal;
5. Pemberian pelatihan untuk SDM koperasi agar dapat lebih dekat dengan teknologi dan mendorong koperasi yang sudah siap untuk menjadi koperasi modern melalui kegiatan bimtek.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kediri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**8,669,469,300**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**8,669,469,300**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**4,,216,537,370**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**4,,216,537,370**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**6 laporan**	**1,053,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**6 laporan**	**1,053,000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	525,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 laporan	525,000	penyusunan dokumen perencanaan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	528,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	528,000	penyusunan laporan kinerja

II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**3,840,402,500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**3,840,402,500**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3,294,434,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3,294,434,000	belanja gaji dan TPP ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	412,160,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	412,160,000	HR tenaga kontrak dan HR pejabat pengadaan barang dan jasa
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	133,283,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	133,283,500	belanja HR pengelola keuangan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	525,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	525,000	penyusunan laporan keuangan dan neraca
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah**	**12 bulan**	**500,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah**	**12 bulan**	**500,000**	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	500,000	belanja HR Pengurus Barang
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**171,190,135**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**171,190,135**	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9,342,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9,342,500	belanja komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24,998,735	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24,998,735	belanja peralatan dan perlengkapan kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	16,449,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	16,449,800	belanja alat dan bahan kebersihan, belanja modal peralatan rumah tangga kantor
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17,499,900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17,499,900	belanja cetak lembar disposisi, SPPD, map dan amplop dinas
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,457,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,457,200	belanja langganan surat kabar
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.392,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.392,000	belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**14 unit**	**1,663,900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah**	**14 unit**	**1,663,900**	

1	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	14 unit	1,663,900	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	14 unit	1,663,900	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**111,956,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**111,956,000**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	belanja materai, materai teraan dan paket pengiriman
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109,956,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109,956,000	belanja tagihan listrik dan telepon
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**20 unit**	**89,771,835**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara**	**20 unit**	**89,771,835**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	30,000,000	belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan pajak kendaraan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	25,000,000	Belanja pemeliharaan dan peralatan mesin kantor
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	34,771,835	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	34,771,835	Belanja pemeliharaan gedung kantor

B	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Tingkat pengawasan Koperasi , Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**13,04%**	**262,488,400**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Tingkat pengawasan Koperasi , Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**13,04%**	**262,488,400**	
I	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Kediri**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**120 kop**	**262,488,400**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Kediri**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi**	**120 kop**	**262,488,400**	
1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60 Unit Usaha	167,752,200	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60 Unit Usaha	167,752,200	Pemeringkatan koperasi dan pengawasan koperasi
2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	140 Unit Usaha	94,736,200	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	140 Unit Usaha	94,736,200	Monev pengawasan koperasi, Revitalisasi Koperasi
C	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1,71%**	**70,256,600**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat**	**1,71%**	**70,256,600**	
I	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**350 kop**	**70,256,600**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya**	**350 kop**	**70,256,600**	

1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	350 unit usaha	70,256,600	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	350 unit usaha	70,256,600	Penilaian kesehatan koperasi
D	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0,20%**	**486,264,200**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase SDM Koperasi terlatih**	**0,20%**	**486,264,200**	
I	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian**	**10 kegiatan**	**486,264,200**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian**	**10 kegiatan**	**486,264,200**	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	406 orang	486,264,200	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	406 orang	486,264,200	Bimtek penguatan kelembagaan koperasi, sosialisasi perkoperasian UP2PKK, bimtek manajemen organisasi koperasi, dan diklat SKKNI
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**33,67%**	**1,212,861,730**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Koperasi Aktif**	**33,67%**	**1,212,861,730**	
I	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**3 kegiatan**	**1,212,861,730**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan**	**3 kegiatan**	**1,212,861,730**	

1	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha	1,212,861,730	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha	1,212,861,730	Pembinaan dan pendampingan koperasi aktif dalam rangka pemberdayaan, peringatan hari koperasi dan hibah uang bagi koperasi
F	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**26,02%**	**1,636,990,400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Partisipasi Usaha Mikro**	**26,02%**	**1,636,990,400**	
I	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**4120 orang**	**1,636,990,400**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitasi perizinan,sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM**	**4120 orang**	**1,636,990,400**	
1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	15 unit usaha	7,358,000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	15 unit usaha	7,358,000	Fasilitasi kemitraan bagi UMKM
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	125 unit usaha	72,060,100	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	125 unit usaha	72,060,100	Sosialisasi PIRT, fasilitasi merk, fasilitasi PIRT
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	210 unit usaha	1,065,369,900	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	210 unit usaha	1,065,369,900	Pelatihan pemberdayaan UMKM, pendampingan UMKM, pelatihan penguatan dan kemasan,

											pelatihan untuk wirausaha baru
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	68,570,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	68,570,000	Kegiatan sinkronisasi pemangku kepentingan dalam pemberdayaa n usaha mikro
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 orang	423,632,400	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Kediri	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 orang	423,632,400	Pelatihan pemasaran, bagi hasil dana bergulir, pendampinga n usaha mikro
G	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**8,27%**	**784,070,600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kabupaten Kediri**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya**	**8,27%**	**784,070,600**	
I	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**200 orang**	**784,070,600**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kabupaten Kediri**	**jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran**	**200 orang**	**784,070,600**	
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Kediri dan luar kabupaten kediri	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	784,070,600	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Kediri dan luar kabupaten kediri	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	784,070,600	Pameran dalam daerah, , konsultasi klinik KUMKM
TOTAL					**8,669,469,300**	**TOTAL**				**8,669,469,300**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan koperasi dan usaha mikro pada tahun 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kajian usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pengumpulan informasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dilakukan dengan menghimpun usulan masyarakat melalui Forum SKPD Kabupaten Kediri serta paparan kecamatan-kecamatan pada Musrenbang tahun anggaran 2024. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Penelaahan/ review hasil usulan program dan kegiatan melalui penjaringan aspirasi masyarakat disajikan dalam tabel 2.10.

Tabel 2.10

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ URAIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				
1	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
	- Pelatihan sablon kepada remaja pada umumnya dan masyarakat di sekitar ploso lor	Desa Ploso Lor Kecamatan Plosoklaten	Meningkatnya ketrampilan remaja desa ploso lor untuk mempunyai usaha sablon	1 Paket	Diakomodir untuk di usulkan di APBD tahun 2024
	- Pelatihan membuat kue	Desa Sukomoro Kecamatan Papar	Meningkatnya ketrampilan masyarakat agar dapat mempunyai usaha pembuatan kue sehingga saat ada kegiatan di Desa tidak harus memesan dari luar Desa Tersebut	1 Paket	Diakomodir untuk diusulkan pada APBD tahun 2024
	- Pelatihan pengemasan produk UMKM	Desa Wenengpaten Kecamatan Gamprengrejo	Meningkatnya nilai jual produk UMKM Desa Wenengpaten Kecamatan Gampengrejo melalui peningkatan kemasan produk	1 Paket	Diakomodir untuk diusulkan pada APBD tahun 2024

BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 adalah Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

a. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
b. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
c. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
d. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up;
e. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan: (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro.

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula
Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro	Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya	jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya tahun N dikurangi jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya tahun N-1 dibagi jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya tahun N-1 x 100%
	Persentase peningkatan kualitas usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang meningkat kualitasnya / Jumlah usaha mikro yang terdata

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menetapkan sasaran :

1. Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi;
2. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan daya saing usaha mikro.

Sasaran		Indikator Sasaran	Formula
1	Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT / Jumlah koperasi aktif x 100%
2	Meningkatnya jumlah dan volume usaha mikro	Pertumbuhan usaha mikro	jumlah usaha mikro tahun ini - jumlah usaha mikro tahun lalu di bagi jumlah usaha mikro tahun lalu x 100%

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan koperasi dan usaha mikro Kabupaten Kediri tahun 2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2023 ditampilkan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani			
MISI 3 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha mikro	**SASARAN I :** Meningkatnya kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi	1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi	1. Penumbuhan koperasi milenial, koperasi unggulan kecamatan dan koperasi modern 2. Peningkatan kesehatan koperasi 3. Peningkatan kualitas SDM koperasi
		2. Peningkatan koperasi aktif	1. Peningkatan pengawasan koperasi melalui pelaporan koperasi secara online 2. Pemberdayaan koperasi
	SASARAN 2 : Meningkatnya jumlah dan volume usaha mikro	1. Peningkatan daya saing melalui penerapan HAKI, sertifikasi dan legalitas usaha produk usaha mikro	1. Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan HAKI, sertifikasi dan legalitas usaha produk usaha mikro
		2. Peningkatan kualitas dan inovasi produk usaha mikro	1. Pengembangan komoditas unggulan 2. Penguatan dan penumbuhan wirausaha baru 3. Meningkatkan kemampuan SDM usaha mikro dalam menjalankan usaha, menghasilkan produk dan memasarkan produknya melalui kegiatan bimtek, pelatihan dan pendampingan 4. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam melakukan produksi
		3. Peningkatan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan pemasaran	1. Fasilitasi pemasaran produk usaha mikro dalam skala lokal, regional dan nasional 2. Fasilitasi kemitraan untuk pembiayaan dan pemasaran bagi usaha mikro

3.3. Program dan Kegiatan TA. 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan yang di laksanakan :

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

   Sub kegiatan:

   - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

   Sub kegiatan :

   - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota;

Sub kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

Sub kegiatan :

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

8. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan yang dilaksanakan:

a. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sub kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Mengacu pada Rencana Kerja berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, jumlah pagu indikatif yang direncanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3.

BAB IV
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kediri

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				8.669.469.300				13.647.900.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.669.469.300				13.647.900.000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.669.469.300				13.647.900.000
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.216.537.370				5.367.505.000
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.053.000				5.150.000
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Dokumen	525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penyusunan dokumen perencanaan	2 Dokumen	1.200.000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Laporan	528.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penyusunan laporan kinerja	4 Laporan	3.950.000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.840.402.500				4.473.300.000
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 Orang/bulan	3.294.434.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja gaji dan TPP ASN	27 Orang/bulan	3.693.000.000
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Dokumen	412.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	HR tenaga kontrak dan HR pejabat pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen	568.000.000
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Dokumen	133.283.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja HR pengelola keuangan	12 Dokumen	210.000.000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Laporan	525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penyusunan laporan keuangan dan neraca	1 Laporan	2.300.000
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				500.000				6.210.000
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja HR Pengurus Barang	12 Laporan	6.210.000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				171.190.135				489.245.000
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Paket	9.342.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	12.000.000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Paket	24.998.735	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	210.000.000
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Paket	16.499.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja alat dan bahan kebersihan, belanja modal peralatan rumah tangga kantor	2 Paket	19.745.000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Paket	17.499.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja cetak lembar disposisi, SPPD, map dan amplop dinas	2 Paket	31.800.000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 Dokumen	3.457.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja langganan surat kabar	5 Dokumen	6.700.000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	99.392.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota	12 Laporan	209.000.000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.663.900				85.000.000
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14 Unit	1.663.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor	14 Unit	85.000.000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.956.000				112.900.000
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja materai, materai teraan dan paket pengiriman	12 Laporan	3.700.000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	109.956.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja tagihan listrik dan telepon	12 Laporan	109.200.000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.771.835				166.200.000
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan pajak kendaraan	10 Unit	47.500.000

2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Belanja pemeliharaan dan peralatan mesin kantor	12 Unit	22.000.000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	34.771.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Belanja pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	96.700.000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				262.488.400				468.750.000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				262.488.400				468.750.000
2	17	03	2.01	01	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi								
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Kediri	60 Unit Usaha	167.752.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeringkatan koperasi dan pengawasan koperasi	140 Unit Usaha	139.000.000
2	17	03	2.01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kabupaten Kediri	140 Unit Usaha	94.736.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Monev Pengawasan Koperasi, Revitalisasi Koperasi	60 Unit Usaha	329.750.000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				70.256.600				131.570.000
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				70.256.600				131.570.000
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kabupaten Kediri	350 Unit Usaha	70.256.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penilaian kesehatan koperasi	350 Unit Usaha	131.570.000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				486.264.200				717.475.000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				486.264.200				717.475.000
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								

						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Kediri	406 Orang	486.264.200	DAK Non Fisik-PK2UKM, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bimtek penguatan kelembagaan koperasi, sosialisasi perkoperasianUP2PKK, bimtek manajemen organisasi koperasi, dan diklat SKKNI	406 Orang	717.475.000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				1.212.861.730				134.000.000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.212.861.730				134.000.000
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota								
						Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	80 Unit Usaha	1.212.861.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	peringatan hari koperasi dan hibah uang bagi koperasi	80 Unit Usaha	134.000.000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.636.990.400				3.516.100.000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				1.636.990.400				3.516.100.000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	15 Unit Usaha	7.358.000	Pajak Rokok	Fasilitasi kemitraan bagi UMKM	15 Unit Usaha	98.500.000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kabupaten Kediri	125 Unit Usaha	72.060.100	Pajak Rokok	Sosialisasi PIRT, sosialisasi BPOM, fasilitasi merk, fasilitasi halal, fasilitasi PIRT	2310 Unit Usaha	389.100.000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	210 Unit Usaha	1.065.369.900	Pajak Rokok		1260 Unit Usaha	2.150.000.000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro								
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Kediri	100 Orang	68.570.000	Pajak Rokok	Pelatihan pemberdayaan UMKM, pendampingan UMKM, pelatihan penguatan dan kemasan, pelatihan untuk wirausaha baru	100 Orang	21.500.000

2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan								
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kabupaten Kediri	150 Orang	423.632.400	Pajak Rokok	Kegiatan sinkronisasi pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	385 Orang	857.000.000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				784.070.600				3.312.500.000
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				784.070.600				3.312.500.000
2	17	08	2.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Kediri dan Luar Kabupaten Kediri	200 Unit Usaha	784.070.600	Pajak Rokok	Pameran dalam daerah, pameran luar daerah, bazar produk usaha mikro, kurasi produk usaha mikro, konsultasi klinik KUMKM, cetak buku produk unggulan, shopping festival, UMKM award	550 Unit Usaha	3.312.500.000
								TOTAL	**8.131.930.517**				**13.647.900.000**

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja ***Dinas Koperasi dan Usaha Mikro*** Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2024.

Rencana Kerja ***Dinas Koperasi dan Usaha Mikro*** Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggara program/kegiatan ***Dinas Koperasi dan Usaha Mikro*** dapat melaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

MAMIEK AMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660720 199003 2 008

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Dipindai dengan CamScanner